

WACANA IDENTITAS NASIONAL: ANALISIS ISI BUKU TEKS PELAJARAN SEJARAH SMA 1975 – 2008

Hieronymus Purwanta

Jurusan Sejarah, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
sastrosukamiskin@yahoo.com

ABSTRACT

This study analyze the discourse of national identity found on history textbooks for high school in 1975 - 2008 period. The objective was motivated by concerns of the decrease tendency of national identity among Indonesian people, especially young people. Through the study, it will be obtained an understanding of how new order groups, especially modernist, reconstruct national identity on history textbooks used by high school students. The research method used is qualitative, which is focused on content analysis of history textbooks. Analysis will focus on the growth of nationalism (1908 – 1945). The results show that national identity discourse in narration of the growth of nationalism (1908 – 1945) is influenced by modernist views.

Keywords: text book, learning history, national identity

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana identitas nasional ditemukan di buku pelajaran sejarah untuk SMA di periode 1975 - 2008. Tulisan ini didorong oleh kekhawatiran dari kecenderungan penurunan identitas nasional di kalangan masyarakat Indonesia, terutama kaum muda. Melalui penelitian ini, maka akan diperoleh pemahaman tentang bagaimana kelompok Orde Baru, terutama modernis, merekonstruksi identitas nasional pada buku pelajaran sejarah yang digunakan oleh siswa SMA. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang difokuskan pada analisis isi buku pelajaran sejarah. Analisis akan fokus pada pertumbuhan nasionalisme (1908 - 1945). Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas wacana nasional dalam narasi dari pertumbuhan nasionalisme (1908 - 1945) dipengaruhi oleh pandangan modernis.

Kata kunci: buku teks, pembelajaran sejarah, identitas nasional

PENDAHULUAN

Ketika wacana kosmopolitanisme diproduksi dan dipropagandakan oleh para pendukung globalisasi melalui berbagai institusi multi nasional, fenomena yang cukup menarik adalah gigihnya usaha untuk memperkuat identitas nasional di antara berbagai negara bangsa. Fenomena memperkuat identitas nasional dengan menggunakan buku teks pelajaran sejarah, yang sering dinegasikan dengan diberi label sebagai

konservatisme, semakin menarik dicermati karena muncul dan berkembang justru di negara-negara maju.

Di Jepang, gerakan memperkuat identitas nasional ditandai dengan berdirinya *Kyokasho o Tsukurukai* (Masyarakat Jepang untuk reformasi buku teks pelajaran sejarah) pada tahun 1996 dengan tokoh utamanya Fujioka Nobukatsu, profesor dari University of Tokyo (Nozaki and Selden, 2009). Kelompok itu mengkritik buku teks mata pelajaran sejarah yang beredar sebagai *masochistic* dan anti Jepang. Krite-

ria seleksi yang ditetapkan departemen pendidikan pada tahun 1982, yaitu "untuk mempertimbangkan kepentingan persahabatan dan kerjasama internasional" justru menjadikan bangsa Jepang lemah. Oleh karena itu, mereka kemudian menerbitkan *Atarashii Rekishi Kyokasho* (Buku teks sejarah baru). Dalam buku teks itu berbagai ekspansi dan perlakuan buruk tentara Jepang selama PD II tidak ditulis, sehingga yang tampak adalah serba positif.

Fenomena memperkokoh identitas nasional dengan menggunakan buku teks pelajaran sejarah juga terjadi di Amerika Serikat. Secara turun temurun, negara-negara bagian menyusun buku teks pelajaran sejarah dengan menonjolkan berbagai peristiwa sejarah yang heroik dan mampu membangkitkan kebanggaan generasi muda terhadap masa lampau bangsanya. Kebanggaan itu termanifestasikan dalam judul-judul seperti *The American Pageant, Our American Heritage, The Great Republic, The Enduring Vision, and America: The Glorious Republic*. Selain itu banyak kalimat yang menarasikan tentang kebanggaan terhadap berbagai keberhasilan Amerika, khususnya dalam demokrasi, kesejahteraan, penguasaan teknologi dan berkembangnya kepemimpinan Amerika Serikat di tingkat dunia (Selden, 2005; Loewen, 1995).

Pada tahun 1994 NCHS (*National Center for History in Schools*) mengeluarkan *National Standards for United States History* yang antara lain berisi lima keterampilan berpikir historis yang harus dikuasai oleh siswa SMA, yaitu *chronological thinking, historical comprehension, historical analysis and interpretation, historical research capabilities, historical issues-analysis and decision-making*. Banyak kritik yang muncul, salah satunya dari William J. Benna, presiden Liga Buku teks. Dia menyatakan bahwa penulis standar buku teks pelajaran sejarah

menggunakan model penulisan sejarah korban, yaitu mengekspos korban dan menegasikan pemenang.

...students are to learn about various Indian cultures, with attention to such things as languages, origin myths, foods, agricultural practices, tools, cultural traditions, and social organization; and they are to learn about West African peoples, with attention to things like folklore, family structures, political structures, works of art, and even "the achievements and grandeur" of the court of Mansa Musa (a 14th-century king of Mali). But wait: Where's the analogous stuff about the Europeans? Aren't the students supposed to study some European cultures and learn about European origin myths, folklore, foods, political structures, agricultural practices, tools, machinery, religious practices, languages, literature, music, and so on? No. Nor are they to learn about the "achievements and grandeur" of any court in, say, Italy... That's bad, but we find worse when we look at some of the specific distortions that mark the UCLA crowd's depiction of Indians. For instance, we don't see anything about how any Indians waged war, carried out conquests, or practiced slavery, although various groups of Indians did all those things. (National Standards for United States History evidently seeks to affirm the fashionable Victimist delusion that slavery was unknown in the New World until it was introduced by Europeans) (Benneta, 1995).

Pada kutipan itu Benneta menjelaskan bahwa siswa harus belajar tentang berbagai budaya Indian, seperti bahasa, mitos asal usul, makanan, praktik pertanian, peralatan, tradisi budaya, dan organisasi sosial. Mereka juga belajar tentang masyarakat Afrika Barat, seperti cerita rakyat, struktur keluarga, struktur politik, karya seni, dan bahkan "prestasi dan keagungan" dari istana Mansa Musa (seorang raja abad 14-Mali). Benneta juga mempertanyakan ketiadaan hal-hal sejenis tentang Eropa. Bukankah seharusnya para siswa untuk

belajar beberapa budaya Eropa dan belajar tentang mitos asal Eropa, cerita rakyat, makanan, struktur politik, praktik-praktik pertanian, alat-alat, mesin, praktik agama, bahasa, sastra, musik, dan sebagainya. Tidakkah mereka juga perlu untuk belajar tentang "prestasi dan keagungan" dari setiap pemerintahan, misalnya tentang Italia. Penjelasan historis tersebut buruk, tetapi menurut Benneta ada yang lebih buruk, yaitu berbagai distorsi yang dilakukan oleh UCLA (*University of California, Los Angeles*) ketika menggambarkan masyarakat Indian. Sebagai contoh, pembaca tidak dapat menemukan bagaimana orang Indian mengobarkan perang, melakukan penaklukan, atau mempraktekkan perbudakan, meskipun berbagai kelompok Indian melakukan semua hal tersebut. *National Standards for United States History* jelas berusaha untuk menggunakan model penulisan *Victimist* (sejarah korban) bahwa perbudakan tidak dikenal di Dunia Baru sampai diperkenalkan oleh bangsa Eropa.

Berdasar berbagai temuannya dalam standar yang disusun NCHS, Benneta memprovokasi bahwa "*There are no national standards for teaching American history, and there won't be any such standards unless a federal panel certifies and promulgates them. So far, that hasn't happened*". Tidak ada standar nasional untuk pelajaran sejarah Amerika, kecuali pemerintah federal menetapkannya. Dari sudut pandang ini, keputusan tentang pemilihan buku teks mata pelajaran sejarah tetap pada level negara bagian (*state*). Salah satu kasus yang merepresentasikan perlawanan terhadap standard yang ditetapkan NCHS terjadi di Texas. *New York Times* pada tanggal 12 Maret 2010 memberitakan bahwa Dewan Pendidikan Texas, pada hari Jumat menyetujui kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang akan menggunakan pandangan konservatif

pada buku teks pelajaran sejarah dan ekonomi, yaitu pandangan yang menekankan keunggulan kapitalisme Amerika, mengkaji komitmen para pendiri bangsa terhadap sistem pemerintahan yang sangat sekuler dan menyajikan filsafat politik Republikan dengan nuansa yang lebih positif.

Di Indonesia, perkembangan yang terjadi menunjukkan kecenderungan ke arah yang berbeda, untuk tidak mengatakan berkebalikan. Pada kajian terhadap wacana dalam buku teks pelajaran sejarah untuk SMU (sekarang disebut SMA) yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1975, Agus Mulyana dan Darmiasti menemukan bahwa pada jilid tiga yang menyajikan materi mulai dari pergerakan nasional sampai dengan zaman Orde Baru didominasi oleh uraian yang bersifat deskriptif naratif dengan model penulisan ideologis, yaitu untuk mendukung kekuasaan Orde Baru (Mulyana dan Darmiasti, 2009: 85).

Penonjolan kepentingan kekuasaan yang bersifat sementara menjadikan narasi buku teks pelajaran sejarah kurang mampu menumbuhkembangkan identitas nasional yang visioner dalam diri generasi muda. Kajian Nordholt menemukan bahwa historiografi Indonesia terjebak pada narasi sejarah yang tidak memiliki masyarakat, dan akibatnya masyarakat menjalani kehidupan dengan "tanpa berlandas sejarah". Dari perspektif ini, menjadi wajar apabila generasi muda Indonesia menjadi tidak lagi memiliki ikatan emosional dengan tanah tumpah darahnya:

Ask young Indonesians today what makes them Indonesians, and the answer may likely surprise, or disappoint you. "I'm Indonesian because I was born in Indonesia and I'm a citizen of Indonesia, I just have to live with that," Intan Nirwani, a 14-year-old high school student, said

when she was asked about what it meant being an Indonesian... For many of today's young people, being Indonesian means nothing more than a "geographical fact" -- because they were born and raised in the country. Nothing more, nothing less. Ramadhani, 22, a high school dropout and a street beggar, and Ismail, 17, a student at the Santi Rama school for the disabled, said they were Indonesians only because they lived here (The Jakarta Post, 16 Agustus 2002).

Kesadaran bahwa buku teks pelajaran sejarah menjadi salah satu penyokong terjadinya krisis identitas nasional, pada masa reformasi berkembang kesadaran untuk mengatasi masalah tersebut melalui berbagai jalan. Salah satunya adalah memperbaharui kurikulum dan sekaligus buku teks. Pertanyaannya adalah seberapa jauh pembaharuan dilakukan dan apakah langkah itu efektif.

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji isi buku teks dari perspektif identitas nasional. Sartono Kartodirdjo (Mulyana dan Darmiasti 2009) memberi rambu-rambu bahwa sejarah nasional harus merupakan "sejarah dari dalam", uraian kekuatan yang mempengaruhi, representasi semua golongan masyarakat, dan merupakan sintesis ke arah integrasi nasional.

Dengan berlandas pada gagasan Sartono, permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana pendekatan yang dikembangkan dalam buku teks pelajaran sejarah SMA Jurusan IPS pada periode tahun 1975 - 2008. (2) Bagaimana keberagaman yang dikembangkan dalam buku teks pelajaran sejarah SMA Jurusan IPS pada periode tahun 1975 - 2008. (3) Bagaimana integrasi nasional yang dikembangkan dalam buku teks pelajaran sejarah SMA Jurusan IPS pada periode tahun 1975 - 2008. (4) Bagaimana wacana yang dikemukakan penulis dalam buku teks pelajaran sejarah SMA Jurusan IPS pada pe-

riode tahun 1975 - 2008.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengkaji tiga buku teks untuk setiap periode kurikulum, sehingga keseluruhannya menjadi 12 buku teks pelajaran sejarah. Di lain pihak, agar lebih fokus, pengkajian dibatasi pada eksplanasi buku teks pelajaran sejarah tentang sejarah pergerakan nasional Indonesia (1908 - 1945).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk mengkaji wacana rekonstruksi identitas nasional melalui konten buku teks yang diproduksi selama pemerintahan Presiden Suharto. Dalam konteks ini, buku teks ditempatkan sebagai dokumen historis yang mengandung "ekspresi subjektif" pengarang (Schleiermacher dan Dilthey) yang terkait dengan kepentingan dan kekuasaan sebagai konteks dalam produksi dan reproduksi wacana (Wodak and Meyer, 2001: 24) serta asumsi, ideologi dan pesan yang diwacanakan dan disampaikan oleh penulis kepada siswa sebagai audien (Crawford, 2001: 327).

Oleh karena itu, pengkajian diarahkan untuk menganalisis term-term superior, baik dalam bentuk kata, kalimat maupun frasa. Term-term superior itu "*not only the object of a particular knowledge, but also the object of a vision*" (Spivak dalam Derrida, 1997: lviii), sehingga ditempatkan sebagai penanda kehadiran kelompok kepentingan (Derrida, 1997: 12); serta *inferior terms* yang difungsikan untuk menegaskan pihak-pihak lain (*others*). Penegasian dapat berupa ungkapan yang menyalahkan, mempenjehatkan maupun mengorbankan pihak-pihak yang dianggap tidak sejalan dengan kelompok kepentingan yang sedang berkuasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan yang Digunakan dalam Buku Teks

Dari perspektif pendekatan, pada periode berlakunya Kurikulum 1975 terlihat ada perkembangan yang menjadi tonggak bagi dinamika yang terjadi pada periode-periode berikutnya, yaitu digunakannya pendekatan struktural dalam menyusun buku teks pelajaran sejarah untuk SMA. Penggunaan pendekatan struktural dalam penyusunan buku teks dipelopori oleh tim yang diketuai oleh Nugroho Notosusanto. Penggunaan pendekatan struktural terlihat semakin berkembang pada periode 1984 - 1994. Selain edisi revisi dan cetak ulang buku teks pelajaran sejarah karangan tim di bawah pimpinan Nugroho Notosusanto, pada periode ini muncul buku teks karangan tim di bawah pimpinan G. Moedjanto.

Karakteristik penulisan buku teks yang menggunakan pendekatan struktural sampai periode ini adalah penempatan struktur kolonial sebagai pihak yang paling besar peranannya dalam melahirkan pergerakan nasional Indonesia. Di luar struktur kolonial, buku teks juga menyinggung struktur regional, yaitu pergerakan nasional di Asia, tetapi relatif kecil peranannya.

Perkembangan penggunaan pendekatan struktural terlihat jelas pada industri buku teks pada periode-periode berikutnya. Dari tiga buku yang dikaji, dua buku berusaha menggunakan pendekatan struktural, yaitu buku teks pelajaran sejarah karangan I Wayan Badrika serta Siti Waridah Q. dkk. Hal yang sama juga terjadi pada produksi buku teks untuk kurikulum 2006. Buku teks karangan Ratna Hapsari dan Abdul Syukur serta Tarunasena menggunakan pendekatan struktural, sedang Mustopo memilih pendekatan naratif.

Meski pendekatan struktural telah terdesiminasi pada penulisan buku teks, bukan berarti kemampuan menggunakan pendekatan itu telah dengan baik dikuasai oleh para pengarang buku teks. Dari 12 buku yang dikaji, hanya dua buku yang menunjukkan kemampuan penggunaan pendekatan struktural dengan baik, yaitu buku teks karangan Nugroho Notosusanto (buku paket untuk kurikulum 1975 dan 1984) dan buku teks karangan Moedjanto (untuk kurikulum 1984). Keduanya mampu menjelaskan pengaruh struktur kolonial terhadap tumbuhnya nasionalisme Indonesia.

Pada buku teks untuk kurikulum 1994 dan 2006, secara kurikuler, para pengarang dituntut untuk menjelaskan pengaruh struktur global, yaitu pemahaman baru di Eropa dan Amerika Serikat, terhadap munculnya pergerakan nasional Indonesia. Tuntutan itu tidak dapat ditunaikan dengan baik. Semua pengarang buku teks yang menggunakan pendekatan struktural gagal menjelaskan pengaruh tersebut. Kegagalan pengarang yang memilih pendekatan struktural memiliki latar belakang yang kompleks. Salah satu faktor terpenting adalah latar belakang pendidikan dan tingkat pemahaman penulis terhadap dasar-dasar ilmu sejarah (Mulyana, 2009: 3). Tanpa pendidikan kesejarahan yang memadai dan pemahaman mendalam tentang metodologi sejarah, pengarang buku teks akan mustahil mampu menerapkan pendekatan struktural dengan baik.

Terlepas dari kualitas penerapannya, penggunaan pendekatan struktural dalam penyusunan buku teks menjadi penanda masuknya pengaruh sejarawan profesional modern (SPM) ke dalam dunia pendidikan sejarah. Sutherland menjelaskan bahwa karakteristik kelompok ini adalah penempatan modernitas kebudayaan Barat sebagai tu-

juan seluruh umat manusia."Narasi besar SPM bersifat teleologis dalam arti menyajikan semua bergerak ke arah satu tujuan tertentu, sebagai perkembangan dari hal yang sederhana dan tidak sempurna ke hal yang kompleks, rasional dan efisien" (Sutherland, 2008: 34 - 35).

Meskipun memiliki aspek positif, bukan berarti penerapan pendekatan struktural pada buku teks tidak memiliki kekurangan. Hasil penelitian Bambang Purwanto (2006) terhadap kajian sejarah di Indonesia, penggunaan pendekatan struktural di Indonesia terjebak pada rekonstruksi sejarah yang deterministik. Temuan Purwanto tersebut juga terjadi dalam buku teks pelajaran sejarah. Rekonstruksi pergerakan nasional dalam buku teks untuk kurikulum 1975 menempatkan struktur kolonial sebagai determinan. Pada buku teks karangan Notosusanto dkk (1992. Jilid 2: 24 - 25) menempatkan politik etis dan penetrasi ekonomi Barat sebagai kekuatan determinan yang melahirkan pergerakan nasional Indonesia. Bahkan ketika menjelaskan tentang pendidikan, pengarang menegaskan bahwa "pengaruh sistem pendidikan Barat adalah sangat menonjol dalam menumbuhkan elite nasional. Dengan ilmu, mereka menghasilkan ide dan pemikiran sendiri untuk kemajuan masyarakat. Begitu pun keahlian seseorang dalam suatu ilmu telah mendesak keturunan sebagai ukuran bagi penentuan status seseorang" (Notosusanto dkk.,1992. Jilid 3: 27).

Penempatan struktur kolonial sebagai kekuatan determinan juga terjadi pada buku teks untuk kurikulum 1984 yang menggunakan pendekatan struktural. Hal itu tampak dari uraian buku teks karangan Moedjanto dkk (1992. Jilid 2) yang mengungkapkan bahwa "pengajaran membawa akibat semakin luasnya wawasan segenap peserta

didik" sebagai latar dari munculnya pergerakan nasional. Bahkan pengarang juga menyampaikan bahwa "pada peralihan abad XX masuk penetrasi ekonomi Barat ke pedesaan secara intensif" yang membawa efek domino pada tumbuhnya kota sebagai pusat kegiatan ekonomi dan nasionalisme (Moedjanto, 1992. Jilid 2: 3)

Pada buku teks untuk kurikulum 1994, pemerintah kolonial Belanda tetap ditempatkan sebagai kekuatan determinan dalam menjelaskan lahirnya nasionalisme Indonesia. Perkembangan penting pada periode ini adalah dari tiga buku teks yang dikaji, semuanya menempatkan tumbuhnya nasionalisme Indonesia secara deterministik pada kekuatan Barat pada umumnya. Hal itu tampak dari judul bab yang mereka gunakan, yaitu "Paham-Paham Baru yang Berpengaruh Terhadap Pergerakan Nasional Asia-Afrika Serta Perjuangan Kemerdekaan Indonesia" (Badrika, 1995: 84); "Perkembangan Paham-paham Baru di Eropa dan Amerika Sampai Perang Dunia II dan Pergerakan Nasional di Asia dan Afrika Serta Pengaruhnya Terhadap Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (Sardiman, dkk., 1996. Jilid 2b: 142), serta "Pengaruh Paham Baru dan Peristiwa Penting Dunia Terhadap Perjuangan Kemerdekaan Indonesia" (Waridah, 2000: 36). Dari judul-judul bab tersebut dapat diambil pemahaman yaitu para pengarang buku teks berusaha menyampaikan pesan bahwa paham-paham baru yang berkembang di Barat merupakan payung yang melindungi dinamika nasionalisme di Indonesia.

Dari judul bab yang telah mengungkapkan kecenderungan deterministik, dapat diperkirakan bahwa uraian penjelasannya pun akan tidak jauh dari usaha menempatkan Barat sebagai kekuatan determinan. Usaha itu antara

lain tampak pada pendahuluan bab II yang di buat oleh Badrika (1995. Jilid 2: 34) di bawah.

Bangsa-bangsa terjajah di Asia, Afrika dan di Amerika tampil memekik "*merdeka!*" "*Usirlah bangsa kolonialis dan imperialis dari bumi kita tercinta!*" Mengapa mereka berontak setelah sekian abad seolah terlelap dalam seribu kepahitan yang melilitnya? Mengapa mereka berontak? Ada sejumlah jawaban yang bisa dikemukakan. Tetapi yang jelas bahwa dasar dari seluruh gerakan nasionalisme dan pergerakan kemerdekaan di negeri-negeri terjajah itu karena pengaruh langsung dan tidak langsung dari beberapa paham baru yang berkembang di Eropa dan merambat ke negeri-negeri jajahan.

Reformasi yang berlangsung pada tahun 1998, tidak membawa perubahan yang berarti dalam arti fakta dan dasar pemikiran baru dari pengarang buku teks. Bahkan pada buku-buku teks untuk kurikulum 2006, pola pemikiran juga tidak banyak berubah. Pada periode ini, buku teks juga menempatkan kebudayaan Barat pada umumnya dan politik kolonial Belanda pada khususnya sebagai satu-satunya kekuatan penentu atau determinan. Pola pemikiran itu dapat disimak pada Tarunasena. Penempatan kebudayaan Barat sebagai kekuatan determinan tidak hanya tampak pada uraian, tetapi juga pada kegiatan atau tugas yang diberikan kepada siswa. Pada halaman 206, menyusun kegiatan siswa sebagai berikut.

Cari di internet atau di surat kabar atau sumber lain yang berhubungan dengan paham-paham tersebut di atas. Selanjutnya, jelaskan hubungan paham-paham tersebut dengan munculnya pergerakan nasional di Indonesia? (Tarunasena, 2009)

Eksplanasi deterministik menjadi dapat dipahami sebagai usaha mewacanakan pemikiran pengarang dari kelompok Sejarawan Profesional Modern (SPM). Karakteristik eksplanasi sejarah SPM adalah "menampilkan sejarah sebagai kemajuan yang berpuncak pada kejayaan modernitas negara-bangsa, yaitu cara berpikir atau cara hidup Barat" serta eksplanasi teleologis yang berpuncak pada terbentuknya masyarakat yang oleh Francis Fukuyama disebut sebagai demokrasi pasar bebas (Sutherland dalam Nordholt, Purwanto dan Saptari, ed., 2008: 34 - 35). Dengan kata lain, identitas nasional yang hendak diwacanakan oleh SPM adalah Indonesia yang "berbudaya Barat". Dari sudut pandang ini, pemberian peran kunci terhadap Barat sebagai kekuatan determinan pada fenomena historis muncul dan berkembangnya nasionalisme Indonesia merupakan representasi dari pandangan sejarawan modernis bahwa identitas nasional Indonesia pada masa modern dewasa ini diharapkan mampu mencontoh dan mengikuti modernitas Barat sebagai tipe ideal.

Pandangan modernistis dari pengarang terlihat jelas dengan pemberian peran penting pada kaum intelektual hasil pendidikan Barat (persekolahan), karena kelompok itulah yang paling banyak menyerap cara berpikir dan cara bertindak Barat. Dijelaskan bahwa kaum intelektual merupakan kelompok sosial dalam masyarakat Indonesia yang digambarkan sebagai terdidik, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, memiliki pandangan luas, kepekaan cukup tinggi, menjadi penegak organisasi modern yang berwawasan nasional serta mementingkan persatuan dan kesatuan. Oleh karena pergerakannya melingkupi wilayah nasional, maka kelompok ini juga disebut sebagai elite nasional (Notosusanto, dkk., 1992, Jilid 3: 25-26; Moedjanto, 1992. Jilid 2: 11-12).

Selain menonjolkan kelompok masyarakat yang sudah mengalami Westernisasi, pengarang juga berusaha menegaskan kelompok yang tetap berpola pikir dan pola hidup Indonesia sebagai bersifat kedaerahan, tradisional, dan pekerjaannya diperoleh dari warisan turun temurun. Bahkan Moedjanto menjelaskan bahwa kelompok ini sebagai “arsitek kesengsaraan rakyat” (Moedjanto, 1992. Jilid 2: 11)

Sealir dengan pandangan yang menonjolkan modernitas sebagai cara berpikir dan cara hidup seperti Barat, pengarang menempatkan Perhimpunan Indonesia (PI) yang beranggotakan mahasiswa Indonesia di Belanda sebagai organisasi pergerakan terpenting bagi terbentuknya identitas nasional Indonesia merdeka. Peran penting PI antara lain dimunculkan oleh pengarang pada pencetusan manifesto politik pada tahun 1925 yang isinya mengubah PI menjadi organisasi politik dengan empat landasan perjuangan, yaitu persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi dan swadaya (Badrika, 1995 Jilid 2: 221-222; Tarunasena, 2009. Jilid 2: 223-224). Kedudukan landasan perjuangan yang dirumuskan PI dipandang sangat penting, karena memberi arah pergerakan nasional di tanah air sekaligus fondasi negara Indonesia merdeka.

Selain mengemukakan bahwa manifesto politik PI sangat penting, wacana yang juga hendak disampaikan adalah bahwa pada tingkat praksis peran anggota dan terutama eks anggotanya sangat besar dalam mengarahkan pergerakan nasional Indonesia. “Pada bulan Juni 1925 Perhimpunan Indonesia menugaskan Budiarto, Sartono dan Arnold Monomutu untuk menyiapkan dan menyebarluaskan propaganda Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda dan di Indonesia” tulis Badrika (1995. Jilid 2: 225). Di antara berbagai peristiwa historis yang dibuat, keikutsertaan menjadi

arsitek berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) merupakan ikon gerak para anggota PI di tanah air.

Wacana bahwa mengadopsi kebudayaan Barat dan sekaligus meninggalkan budaya asli sebagai satu-satunya identitas nasional bangsa modern tidak hanya dinarasikan oleh buku teks. Salah satu kajian sejarawan Barat yang banyak dirujuk oleh sejarawan Indonesia, termasuk di dalamnya para pengarang buku teks, adalah karya Robert van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite* yang terbit pada tahun 1960 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 1984.

Tesis yang diangkat Niel adalah bahwa semua elite modern Indonesia merupakan hasil didikan Barat dan paling sedikit telah mengadopsi beberapa aspek kebudayaan Barat. Mereka digambarkan sebagai “lebih bersifat Barat dalam pendidikan dan pengajarannya dan dalam konsepsinya mengenai negara dan masyarakat” (Niel, 2009: 43). Oleh karena itu, menjelaskan kebijakan pemerintah kolonial sebagai *trigger* munculnya elite modern Indonesia merupakan konsekuensi logis dari posisi yang diambilnya. Untuk memperkuat tesisnya, Niel berusaha mem-Baratkan semua fenomena historis yang terkait dengan muncul dan berkembangnya nasionalisme Indonesia. Salah satu analisisnya terhadap berdirinya Sarekat Dagang Islam yang notabene berjiwa bukan Barat sebagai berikut.

Karena Samanhudi sendiri tidak mempunyai waktu maupun bakat untuk membentuk suatu organisasi, ia pun berusaha mencari seorang direktur-organisor. Pilihannya jatuh pada seorang yang telah mempunyai pengalaman dalam organisasi perdagangan: Raden Mas Tirtoadisuryo...Tirto telah mendapat pendidikan sekolah administratur (OSVIA) (Niel, 2009: 135)

Dengan memasukkan tokoh Tirtoadisuryo, Niel telah berhasil membaratkan Sarekat Dagang Islam, meskipun hanya wadah atau bungkusnya. Dari sudut pandang ini, tesis Niel tetap dapat dipertahankan, yaitu bahwa semua gerak elite modern Indonesia merupakan hasil dari proyek westernisasi. Pola yang sama dilakukannya terhadap berbagai gerakan yang berbasis Islam, termasuk terhadap Muhammadiyah (Niel, 2009: 129 - 130).

Wacana sejenis juga dikemukakan oleh sejarawan Indonesia. Salah satunya adalah Sartono Kartodirdjo yang menjadi editor kunci dalam penulisan Sejarah Nasional Indonesia (1975). Ketika membahas Politik Etis sebagai pilar utama program westernisasi, dia menjelaskan sebagai berikut.

Perlu dijelaskan di sini, bahwa pada masa peralihan dari abad ke-19 ke-20 politik Ethis berkembang hampir bersamaan dengan, dan dimungkinkan oleh, arah baru di dalam politik kolonial partai-partai Belanda; arah baru itu biasanya disebut dengan nama politik kolonial dari pada pendidikan moral. Sehubungan dengan arah baru di dalam politik kolonial itu, maka tugas kolonial selanjutnya dipandang sebagai misi kebudayaan yang bersifat moral, sedang "politik mencari keuntungan" telah ditinggalkan. Cita-cita yang ideal ialah "memasukkan rakyat Indonesia ke dalam orbit kebudayaan penguasanya, supaya mereka memiliki kebudayaan Barat" (Kartodirdjo, 1992. Jilid 2: 50).

Meskipun pernyataan bahwa Belanda telah meninggalkan politik mencari untung perlu diragukan kebenarannya, tetapi dalam konteks ini kutipan di atas pengarang dengan sangat jelas menarasikan politik Etis sebagai politik westernisasi.

Hasil dari politik Etis adalah terbentuknya kaum intelektual yang

memiliki cara berpikir dan cara hidup Barat. Mereka sangat terkesan dengan "tingkat kemajuan yang telah dicapai di Barat" dan "menyebabkan timbulnya aspirasi-aspirasi untuk mengadakan invasi atau modernisasi menurut model Barat pada umumnya dan Belanda pada khususnya" (Kartodirdjo, 1992. Jilid 2: 84). Selain menonjolkan proses westernisasi, pengarang menegaskan kebudayaan asli sebagai yang layak dan pantas untuk ditinggalkan. Penegasian itu dilakukan dengan jalan menyusun eksplanasi sebagai berikut.

Dalam menghadapi perubahan sosial yang diakibatkan oleh penetrasi sistem kolonial di satu pihak, dan terbukanya masyarakat pribumi terhadap pengaruh-pengaruh dari luar di pihak lain, mau tak mau tradisi mengalami keretakan yang lama-lama menimbulkan krisis. Kekuatan-kekuatan sosial-ekonomi menciptakan kondisi hidup baru yang tidak hanya mendobrak sistem serba tertutup tetapi juga membuka kesempatan-kesempatan baru... Kejutan-kejutan kultural terjadi; banyak pertanyaan dan persoalan sekitar tradisi sendiri; maka meledaklah krisis dalam kehidupan tradisional. Nilai-nilai goncang dan dipertanyakan relevansinya dengan zaman baru, banyak lambang kehilangan maknanya, orientasi hidup tidak mantap lagi, pendeknya tradisi mulai goncang pada dasar-dasarnya (Kartodirdjo, 1992. Jilid 2: 99 - 100).

Dari kutipan di atas tampak bahwa pengarang berpendapat bahwa tradisi asli tidak mampu bertahan ketika menghadapi arus penetrasi Barat dan zaman keterbukaan. Ketidakmampuan itu mengakibatkan krisis dan "goncang pada dasar-dasarnya".

Pandangan deterministik menjadikan penjelasan sejarah jauh dari realitas obyektif (Purwanto, 2006), karena menempatkan fenomena historis di Indo-

nesia semata hanya sebagai manifestasi dari kebudayaan Barat yang diserap oleh para pelaku sejarah. Ketidakmampuan mendekati realitas obyektif paling tampak adalah ketika menempatkan kaum intelektual hasil pendidikan Barat sebagai satu-satunya kelompok yang menjadi pelopor pergerakan nasional dan membentuk negara bangsa seperti Barat sebagai tujuan. Pandangan itu menutup berbagai fenomena sejarah pergerakan nasional, misalnya Sarekat Dagang Islam (SDI), Jamiat Khier dan Perhimpunan Minahasa yang ditinjau dari pendirinya berada di luar proses westernisasi, dalam arti mengikuti pendidikan Barat. Penjelasan Robert van Niel bahwa organisasi SDI disusun oleh Tirtoadisuryo tidak dapat menutupi realitas bahwa kehidupan pendirinya berada di luar lingkaran westernisasi, termasuk di dalamnya alam pemikirannya.

Salah satu fenomena historis lain yang tidak mampu diwadahi oleh pandangan modernis bahwa mengadopsi budaya Barat merupakan cita-cita Indonesia modern adalah polemik kebudayaan yang terjadi pada tahun 1935. Berawal dari perdebatan dalam kongres Permusyawaratan Perguruan Indonesia di Solo, berkembang menjadi polemik di surat kabar. Polemik memperdebatkan tentang kebudayaan Indonesia di masa depan. Sutan Takdir Alisjahbana seorang diri yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia harus mengadopsi jiwa kebudayaan Barat harus menghadapi tokoh-tokoh pergerakan lainnya yang berpandangan bahwa bangsa Indonesia harus mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan aslinya (Mihardja, 1977). Oleh karena fenomena historis itu bertolak belakang dengan pandangan sejarawan modernis, maka tidak satupun buku teks yang memuatnya. Dengan kata lain, peristiwa historis itu ditenggelamkan atau dipandang ti-

dak penting untuk ditulis.

Oleh karena menempatkan Barat pada umumnya dan pemerintah kolonial Belanda pada khususnya sebagai kekuatan determinan, tidak satupun buku teks yang berusaha menggali kebudayaan lokal sebagai habitus bagi lahirnya nasionalisme Indonesia. Struktur lokal, yaitu kondisi sosio-kultural tempat para pelaku sejarah pergerakan nasional dilahirkan dan dibesarkan, cenderung diabaikan atau dipandang sebagai unsur yang tidak memiliki relevansi tinggi untuk dibahas dalam rekonstruksi sejarah nasionalisme Indonesia. Akibatnya, penjelasan yang diberikan tidak mampu menjangkau "history from within" seperti dianjurkan oleh Sartono Kartodirdjo. Fenomena muncul dan berkembangnya nasionalisme bukan dipandang sebagai representasi pelaku sejarah dengan seluruh konstruk mentalnya, tetapi sekedar sebagai akibat tak terduga dari inovasi Barat.

Eksplanasi struktural deterministik yang dikembangkan para pengarang buku teks pelajaran sejarah melahirkan persepsi dalam diri para siswa bahwa kebudayaan Barat merupakan tipe ideal. Dengan kata lain, determinisme tersebut mengakibatkan mata pelajaran sejarah menjadi kontra produktif dalam mewariskan dan mengembangkan identitas nasional. Para siswa akan berpendapat bahwa identitas nasional tidak perlu dipertahankan dan dikembangkan, karena kualitasnya jauh di bawah identitas global yang "secara historis" telah terbukti mampu memainkan peran penting dalam dinamika sejarah nasional Indonesia.

Keberagaman dalam Buku Teks

Dari perspektif keberagaman, terlihat bahwa seluruh buku teks lebih menekankan ragam organisasi pergerakan

nasional yang berkembang di Jawa. Hal itu dimungkinkan karena Jawa menjadi pusat pemerintahan pada zaman kolonial, sehingga sumber-sumber yang dijadikan landasan penulisan sejarah tersedia relatif lengkap. Penekanan pada ragam organisasi tingkat nasional dapat disimak dalam uraian buku teks tentang organisasi sosial, politik, keagamaan, wanita dan pemuda/pelajar. Dari buku-buku teks yang dikaji, semua membahas ragam organisasi nasional tersebut. Perbedaan antara satu buku dengan buku lainnya terletak pada tingkat kedalaman pembahasannya.

Selain fokus pada ragam organisasi, karakteristik lain yang cukup menonjol adalah penekanan uraiannya pada pribumi. Sebaliknya, penjelasan tentang etnik non pribumi, seperti Indo-Belanda, Tionghoa, dan Hadrami/Arab hampir-hampir tidak pernah dilakukan. Penyebutan, dan bukan penjelasan, etnik non pribumi dilakukan oleh sebagian besar pengarang buku teks ketika menjelaskan organisasi nasional atau pergerakan kaum pribumi. Misalnya, ketika menjelaskan tentang Indische Partij, pengarang antara lain menyebutkan bahwa "Pendiri Indische Partij adalah tiga serangkai, yaitu Douwes Dekker (Setyabudi Danudirjo), Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), dan Cipto Mangunkusumo" (Moedjanto, 1992. Jilid 2: 41) tanpa menjelaskan identitas Douwes Dekker sebagai Indo-Belanda. Penjelasan agak mendalam tentang Indo-Belanda diberikan oleh Badrika (1997. Jilid 2). Tarunasena (2009) yang buku teksnya berhasil lolos seleksi dari pemerintah melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sama sekali tidak menjadikan keberagaman etnik dalam eksplanasinya.

Dari buku-buku teks yang dikaji tampak bahwa eksplanasi historis tentang keberagaman masih sangat kurang.

Sebagai buku teks pelajaran sejarah, kurangnya perhatian terhadap keragaman etnik dan disertai keberimbangan dalam narasi akan menyampaikan pesan kepada siswa SMA bahwa kelahiran Indonesia adalah sekedar keputusan politik yang terjadi di Jawa pada tahun 1945 oleh orang Jawa atau orang luar Jawa yang telah mengalami "penjawaan". Dengan kata lain, identitas keindonesiaan yang sekarang mereka miliki adalah status politik selama masih dalam dominasi etnik Jawa. Dalam realitas kehidupan sehari-hari, secara sosio-kultural etnik-etnik di Indonesia masih tetap menempatkan identitas etnik mereka pada posisi yang tertinggi. Kasus penolakan etnik Dayak terhadap etnik Madura pada tahun 2001 mengindikasikan bahwa meski secara legal setiap warga negara dapat bertempat tinggal dimana saja di wilayah Indonesia, pandangan bahwa etnik lain sebangsa sebagai "*the others*" tetap dihidupi (Purwanto, 2006).

Integrasi Nasional

Dari perspektif integrasi nasional, terlihat hampir semua buku teks telah berusaha untuk menarasikannya sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pola yang umum digunakan oleh pengarang buku teks untuk menggambarkan integrasi nasional adalah terdapatnya kerjasama antar kaum pergerakan di tingkat nasional. Kerjasama itu dapat bersifat sementara atau *ad hoc*, yaitu ketika organisasi-organisasi pergerakan menggabungkan kekuatan bersama untuk menghadapi suatu permasalahan. Sebagai contoh adalah pembentukan *Radicale Concentratie* pada tahun 1918 (Siswoyo, 1979. Jilid 1).

Pola ke dua adalah pembentukan organisasi baru yang merupakan federasi dari berbagai organisasi yang

ada. Kerjasama tersebut relatif lebih permanen dengan tanpa menghilangkan eksistensi dan kegiatan internal masing-masing organisasi pergerakan. Kerja sama pola federasi itu cukup populer di antara kaum pergerakan, sehingga paling banyak digunakan. Tujuannya adalah untuk menyamakan arah aksi kebangsaan, memperkuatnya dengan memperbaiki organisasi dan melakukan kerjasama dalam perjuangan, serta menghindari perselisihan antar anggota yang hanya merugikan perjuangan (Notosusanto, 1992. Jilid 2: 81 - 82). Pola ketiga adalah fusi atau peleburan berbagai organisasi pergerakan ke dalam satu organisasi baru. Melalui proses peleburan, berbagai organisasi lama mengakhiri eksistensinya dan sepenuhnya menggunakan identitas baru. Salah satu contoh proses peleburan terjadi pada tahun 1935 yang melahirkan Partai Indonesia Raya atau dikenal sebagai Parindra.

Penulisan buku teks pelajaran sejarah periode 1975 - 2006 didominasi oleh pendekatan struktural yang secara konseptual akrab dengan struktur dan penyusunan generalisasi terbatas (pola-pola). Akan tetapi, dalam kenyataannya kelemahan utama eksplanasi tentang integrasi nasional adalah tidak disusunnya generalisasi terbatas, dalam konteks ini adalah pola-pola integrasi, untuk menjelaskan kerjasama yang berlangsung di antara kaum pergerakan. Akibatnya aspek diakronis perkembangan integrasi nasional tidak dapat terjabarkan secara optimal.

Secara teoritis, integrasi nasional paling tidak mengandung dua unsur utama, yaitu integrasi vertikal yang berkait dengan hubungan antara elite dengan massa rakyat serta integrasi horisontal yang terkait dengan dinamika sosio kultural daerah dan penciptaan hubungan yang kohesif dengan daerah-daerah lain secara nasional (Sjamsuddin

dalam Bahar dan Tangdililing, 1996: 4). Dari sudut pandang teoretis, para pengarang buku teks lebih banyak menjelaskan integrasi vertikal dan sangat kurang pada integrasi horisontal.

Kekurangan pada eksplanasi integrasi horisontal antara lain tampak pada kekosongan dalam menjelaskan etno-nasionalisme. Bukan berarti di Indonesia tidak terdapat fenomena historis tentang etno-nasionalisme, tetapi oleh para pengarang buku teks ditempatkan sebagai fenomena nasionalisme. Penempatan etno-nasionalisme sebagai nasionalisme Indonesia seperti yang terjadi pada kasus Budi Utomo, menjadikan dinamika terbentuknya integrasi nasional yang terikonkan dalam "*Bhineka Tunggal Ika*" tidak dapat terkemukakan dengan baik. Purwanto (2006: 182) menjelaskan bahwa "proses pembentukan identitas keindonesiaan berjalan seiring dengan identitas etnik. Dua-duanya mengalami proses transformasi secara sinergis membentuk identitas masing-masing tanpa harus saling bertentangan". Dari sudut pandang ini, buku teks pelajaran sejarah sudah seharusnya menjelaskan proses transformasi tersebut dengan tanpa menghilangkan aspek kebhinekaan identitas masing-masing etnik. Proses tersebut antara lain terlihat pada isi Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yaitu "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia". Para pemuda pada tahun 1928 tidak merumuskan "berbahasa satu, bahasa Indonesia" tetapi "menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Perumusan itu sangat tepat, karena tetap mengakui pentingnya eksistensi bahasa daerah. Dari sudut pandang ini, distorsi makna yang sangat fatal apabila Sumpah Pemuda dirumuskan oleh pengarang buku teks sebagai "Ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa" (Moedjanto, 1992. Jilid 2: 14), karena akan melegiti-

masi penetrasi bahasa nasional dengan cenderung meminggirkan, dan bahkan menghapuskan bahasa daerah.

SIMPULAN

Sejak penerapan kurikulum 1975, sedikit demi sedikit buku teks pelajaran sejarah menggunakan pendekatan struktural, terutama ketika membahas muncul dan berkembangnya pergerakan nasional di Indonesia. Permasalahannya adalah bahwa sebagian besar pengarang kurang memahami secara mendalam dan terampil menerapkan pendekatan struktural dalam rekonstruksi sejarah. Hal itu terutama terlihat pada periode kurikulum 1994 dan 2006 yang memuat pembahasan tentang paham-paham baru di Eropa dan pengaruhnya di Asia dan Afrika. Kegagalan penerapan pendekatan struktural oleh pengarang diantaranya dalam menjelaskan penyebaran paham-paham baru di Eropa yang dilakukan oleh struktur kolonial. Permasalahan lain adalah pendekatan struktural yang diterapkan melahirkan penjelasan deterministik yang mewacanakan identitas nasional Indonesia sebagai hasil pengabdian budaya Barat. Wacana itu perlu dikritisi, karena mengandung nuansa "penjajahan budaya".

Dari perspektif keberagaman, kekurangan utama buku teks pelajaran sejarah periode 1975 - 2008 adalah pada narasi tentang etnik-etnik di Indonesia. Bahkan untuk etnik Indo Belanda dan Timur Asing, dapat dikatakan terjadi kekosongan. Hal itu akan mewacanakan bahwa kelahiran Indonesia adalah sekadar keputusan politik yang terjadi di Jawa pada tahun 1945 oleh orang Jawa atau orang luar Jawa yang telah mengalami "penjawaan". Dari perspektif integrasi nasional, pengarang buku teks pelajaran sejarah lebih banyak memba-

has integrasi vertikal dan sangat kurang pada proses integrasi horisontal. Kekurangan tersebut menjadikan wacana yang ternarasikan adalah bahwa identitas nasional menggantikan identitas lokal. Wacana itu perlu dikritisi karena akan melegitimasi penetrasi identitas nasional terhadap identitas lokal dan eksplanasi yang dilakukan jauh dari realitas obyektif yang menunjukkan bahwa semua etnik tetap menghidupi identitas mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Asvi Warman. 2009. *Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku dan Peristiwa*. Jakarta: Kompas.
- Badrika, I Wayan. 1997. *Sejarah Nasional Indonesia dan Umum untuk SMA*, Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Benneta. 1995. "Victimist: Delusions Are In. Science and Technology Are Out." E-article pada *The Textbook Letter*. The Textbook League (PMB 272, 40 Fourth Street, Petaluma, California 94952).
- Crawford, Keith. 2001. "Constructing national memory: The 1940/41 Blitz in British history textbooks". *Internationale Schulbuchforschung* 23. Verlag Hahnsche Buchhandlung . ISSN 0172-8237.
- Derrida, Jacques. 1997. *Of Grammatology*. Translated by Gayatri Chakravorty Spivak. London: The Johns Hopkins University Press
- Hapsari, Ratna dan Abdul Syukur. 2008. *Eksplorasi Sejarah Indonesia dan Dunia*. Jilid 3. Jakarta: Erlangga.
- Idris, Z.H., dkk. (1979). *Sejarah Untuk SMA*. Jakarta: Mutiara
- Jakarta Post*, 16 Agustus 2003.
- Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.
- . 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*. Jilid 2. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. 2005) *Sejak Indische*

- sampai Indonesia. Jakarta: Kompas.
- Loewen, W. 1995. *Lies My Teacher Told Me: Everything Your American History Textbook Got Wrong*. New York: Touchstone Rockeveller Center.
- Moedjanto, G., dkk. 1992) *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid 3. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Mulyana, Agus dan Darmiasti. 2009. *Historiografi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyana, Agus. 2009. "Pendekatan Historiografi Dalam Memahami Buku Teks Pelajaran Sejarah". Makalah pada Seminar Nasional "Mendekonstruksi Permasalahan Pembelajaran Sejarah Di Sekolah", Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI pada tanggal 19 Oktober 2009.
- Mustopo, Habib, dkk. 2007. *Sejarah SMA*. Jilid 3. Surabaya: Yudhistira.
- New York Times*, 12 Maret 2010
- Nordholt, Henk Schulte, Bambang Purwanto dan Ratna Saptari, (ed). 2008. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nordholt, Henk Schulte. 2004. "Decolonising Indonesian Historiography". Paper delivered at the Centre for East and South-East Asian Studies public lecture series "Focus Asia", 25-27 May, 2004 at Lund University, Sweden.
- Notosusanto, Nugroho dkk.. (1981 dan 1992). *Sejarah Nasional Indonesia Untuk SMA*. Jilid 3. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nozaki, Yoshiko and Mark Selden. 2009. "Japanese Textbook Controversies, Nationalism, and Historical Memory: Intra- and Inter-national Conflicts" dalam *Asia-Pacific Journal*, Vol 24-5-09, June 15, 2009
- Purwanto, Bambang dan Asvi Warman Adam. 2005. *Menggugat Historiografi Indonesia*. Yogyakarta, Ombak.
- Purwanto, Bambang. 2006. *Gagalnya Historiografi Indonesia?!*. Yogyakarta: Ombak.
- Sardiman, A.M., dkk. 1996. *Sejarah Nasional dan Umum untuk SMA*, Jilid 2b dan 2c. Surabaya: Kendang Sari
- Selden, Mark. 2005. *Remembering 'The Good War': The Atomic Bombing and the Internment of Japanese-Americans in U.S. History Textbooks*. E-paper diakses dari <http://japanfocus.org/-Mark-Selden/1943>
- Siswojo, S.W. 1979. *Sejarah Untuk SMA*, Jilid 1. Klaten: Intan
- Sjamsuddin, Nazaruddin, "Dimensi Politik dari Integrasi Nasional: Tinjauan Teoretis" dalam Bahar, Safoedin dan AB Tangdililing. 1996. *Integrasi Nasional: Teori, Masalah dan Strategi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soewarso, Ibnoe. 1986. *Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia*. Jilid 3. Surakarta: Widya Duta.
- Sutherland, Heather. (2008). "Meneliti sejarah penulisan sejarah" dalam Nordholt, Henk Schulte, Bambang Purwanto dan Ratna Saptari, ed. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tarunasena. 2009. *Sejarah SMA/MA*. Jilid 3. Bandung: Armico.
- Waridah Q., Siti, dkk. 2000. *Sejarah Nasional dan Umum untuk SMA*. Jilid 2. Jakarta: Bumi Aksara
- Wodak, R. and M. Meyer (eds.). 2006. *Methods of Critical Discourse Analysis*. London: Sage.